BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa Setianegara yang berada di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang termasuk sebagai penyangga kawasan hutan Gunung Ciremai. Desa Setianegara memiliki luas wilayah 405.17 hektar dengan topografi berada di lereng Gunung Ciremai. Luas hutan di desa tersebut mencapai 200 hektar. Karena areanya yang didominasi oleh hutan dan kondisi topografi desa tersebut, memiliki potensi tinggi untuk menjadi desa penghasil komoditas alam, seperti hutan produktif karena memiliki syarat lahan dan sistem penopangnya yang mendukung. Adapun peran penting lain dari desa penyangga hutan, seperti pemegang kunci sistem hidrologi, pencegah bencana alam, pemelihara tempat hidupnya keanekaragaman hayati, dan pengelola lahan dengan tanah produktif.

Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat yang memiliki ketinggian 3.078 mdpl dengan total luas hutan 14.841 Ha. Kawasan gunung tersebut memiliki kekayaan hayati serta potensi ekonomi hijau yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat penyangga gunung tersebut. Dengan status konservasi, gunung tersebut memiliki peran sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem service*), seperti habitat biodiversitas, gudang komoditas sumber daya hayati, zona kunci siklus hidrologis, “paru-paru” dunia, memitigasi bencana secara alami, dan lainnya untuk peningkatan kualitas alam dan kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) sebagai pihak pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadikan masyarakat desa penyangga Gunung Ciremai sebagai pengelola hutan gunung tersebut. Salah satunya adalah Desa Setianegara melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) Sapu Jagat sebagai subyek sekaligus tuan rumah di desanya sendiri. Mereka memiliki peran sebagai pengelolanya dengan berpedoman pada tiga pilar pengelolaan yaitu, kelola ekonomi, kelola sosial & budaya, dan kelola ekologis.

Hutan TNGC wajib dijaga dan dikelola secara berkelanjutan karena memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Sebab, hutan itu adalah elemen penting dalam ekosistem di kawasan konservasi untuk menjaga kehidupan di dalamnya sekaligus memiliki potensi ekonomi tinggi untuk kemakmuran masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, dengan dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Kehutanan Sosial, hutan dapat dikelola oleh masyarakat, termasuk hutan TNGC. Berdasarkan konsep jasa ekosistem yang dikemukakan oleh Millennium Ecosystem Assessment (MA) (2005: 40), hutan harus tetap berfungsi sebagai penyerap karbon (*carbon sink*) dan menjadi daerah tangkapan air (*watershed*). Selain itu, hutan harus berperan sebagai vegetasi agar tetap lestari dan penyeimbang ekosistem untuk menjaga seluruh kehidupan di dalamnya.

Lebih jauh, potensi alam daratan, salah satunya hutan Gunung Ciremai, tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai potensi ekonomi dan sosialnya yang dapat dimanfaatkan secara lestari dengan dasar Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 77 Tahun 2019, perlu adanya pemberdayaan yang dilakukan antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi. Hal itu bisa dilakukan seperti aktivitas produksi HHBK (hasil hutan bukan kayu) dari pohon MPTS (*multi purpose tree species*) yang memiliki nilai jual tinggi tanpa merusak ekosistem hutan.

Model pemanfaatan HHBK mampu berkontribusi kepada ekonomi masyarakat yang bahkan melindungi mereka dari guncangan ekonomi. Sebagaimana data dari Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), produksi ton dan hasil rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya secara nasional, di mana pada tahun 2018 berkontribusi sebesar Rp10.904.813.462 dengan hasilnya 289.659 ton dan pada tahun 2022 sebesar Rp 46.085.291.575 dengan 1.013.704 ton. Peraturan Dirjen KSDAE No. 6/2018 Pasal 1 No. 10 pun menegaskan bahwa memang kawasan konservasi dengan sistem zona tertentu perlu diadakan ruang untuk akses kelola ekonomi masyarakat desa penyangga hutan. Salah satunya dengan pemanfaatan HHBK.

Kondisi faktual terhadap desa penyangga TNGC memiliki kontradiksi dengan harapannya pada pilar pengelolaan TNGC ataupun landasan-landasan normatif tersebut. Di satu sisi, masyarakatnya bergantung pada hutan di kawasan konservasi TNGC untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan, degradasi hutan, dan aktivitas

ilegal akibat tiadanya kontrol yang mengancam keberlangsungan ekosistem hutan tersebut sehingga berimplikasi pada penurunan bahkan kehilangan nilai pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi hampir setiap tahun melanda ratusan hektar. Terakhir tercatat kebakaran hutan terjadi Agustus 2024 sekitar 150 hektare menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan. Selain itu, kerap terdapat praktik eksploitasi ilegal yang berupa penebangan, perambahan, dan pembalakan liar untuk mendapatkan hasil instan dengan tidak menghiraukan aturan. Tercatat menurut BTNGC jumlah ekploitator ilegal mencapai 4.500 orang dan memiliki kemungkinan jumlah angka lebih tinggi akan pelaku tersebut. Ketika masyarakat menggantungkan hidup pada ekstraksi sumber daya alam dan bila tidak terkontrol, maka menghilangkan tujuan pada pilar pengelolaan kawasan TNGC untuk dimanfaatkan potensi ekonomi bagi masyarakat penyangganya. Hal itu dapat berujung pada kehilangan manfaat untuk diperolehnya usaha pemberdayaan dengan berbasis konservasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Ketidakmampuan mengontrol ekosistem hutan berpotensi menimbulkan banjir, longsor, erosi, serta konflik manusia dan satwa akibat terganggunya habitat (Andriansyah, 2019: 78–80). Siklus hidrologis pun terancam, padahal BTNGC mencatat terdapat 97 mata air dengan debit 9.057,61 liter per detik yang penting bagi masyarakat. Jika fungsi hutan hilang, tanah menjadi kurang subur, tutupan berkurang, dan risiko perubahan iklim semakin besar.

Di sisi ekonomi, nilai pemanfaatan hutan secara berkelanjutan berpotensi merosot. Nilai pemanfaatan hutan untuk kegiatan ekonomi, seperti untuk

produksi komoditas alam secara berkelanjutan, aman, dan tidak merugikan secara ekologis menjadi menurun aktivitasnya karena potensi pendukung alamnya mengalami degradasi, baik dari segi kualitas tanah, ketersediaan & kualitas air maupun keragaman hayati yang menjadi penopang sistem produksinya. Hal itu turut menyumbang pada berkurangnya kuantitas hasil komoditas dan pendapatan masyarakat yang di mana mereka menggantungkan kehidupannya pada kawasan hutan. Ketika hutan tidak lagi memberikan jaminan ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan, maka masyarakat penyangganya kehilangan pijakan utama dalam membangun kesejahteraannya.

Upaya serius dan berkelanjutan diperlukan untuk mengelola ekosistem hutan TNGC agar tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Pengelolaan ini tidak hanya mencegah kerusakan, tetapi juga mengarahkan pemanfaatannya bagi pemberdayaan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dengan menjaga keseimbangan konservasi dan ekonomi melalui program yang legal, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal, potensi hutan dapat dioptimalkan tanpa merugikan ekologi; sebaliknya, jika diabaikan, kerusakan hutan akan menimbulkan dampak negatif ekologis dan sosial-ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pengelolaan kawasan konservasi hutan bukan hanya kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga merupakan komitmen nasional sebagaimana dalam Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Lestari (2025-2029) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL). Rencana itu mencakup penguatan kebijakan, optimalisasi fungsi hutan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengembangan produk hutan melalui hilirisasi. Tujuannya adalah

untuk peningkatan pemberdayaan dan akses kelola hutan oleh masyarakat. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menetapkan agar sekitar 30 sampai 35% kawasan hutan dikelola masyarakat dalam skema yang ada pada program Perhutanan Sosial. Urgensi komitmen ini terlihat dari fakta bahwa dari 120,3 juta hektare kawasan hutan milik negara, hampir separuhnya: 55,93 juta hektare atau 46,49% belum dikelola secara intensif.

Adapun upaya pengelolaan ekosistem hutan sejatinya merupakan perwujudan dari amanah fundamental manusia dalam Islam sebagai penjaga dan pengelola bumi (*Khalifah fil Ard*). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Q.S Al-Baqarah ayat 30, manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Hadits Riwayat Muslim nomor 2742 di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa "Dunia ini hijau dan indah, dan Allah telah mengangkatmu sebagai pengelola di dalamnya." Berdasarkan Hadits ini, kawasan hutan dipandang sebagai karunia sekaligus ujian yang menuntut pengelolaan yang adil dan seimbang (*mizan*) seperti yang diperintahkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Namun, dari kondisi faktual yang ada, seperti kebakaran hutan, degradasi, dan eksploitasi ilegal merupakan cerminan dari kerusakan di muka bumi (*Al-Fasad fil Ard*) yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu, upaya pembangunan suatu program untuk pengelolaan ekosistem hutan merupakan ikhtiar untuk mencegah kerusakan dan sebagai bentuk kerjasama dalam kebaikan (*ta'awun 'alal birri wat taqwa*) sebagaimana dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) merupakan pendekatan yang berbasis pada kekuatan, potensi, bakat dan sumber daya individu dan masyarakat, dan memobilisasi masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan (Afandi et al, 2022: 226). ABCD memandang setiap individu, kelompok, dan lingkungan memiliki potensi yang dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan bersama beserta mengurangi ketergantungan pihak luar. Dalam konteks Desa Setianegara sebagai desa penyangga TNGC, pendekatan ini relevan karena mampu mengidentifikasi aset yang ada kemudian mengintegrasikannya dalam program pengelolaan ekosistem hutan. Jadi, ABCD memandang bagaimana memperkuat kapasitas masyarakat sebagai pengelola hutan agar mandiri beserta memastikan pengelolaan tersebut memberi manfaat secara ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Untuk itu, program pengelolaan ekosistem hutan di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), khususnya di Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, menjadi salah satu indikasi konkret dari upaya implementatif untuk menjawab berbagai tantangan kerusakan ekosistem serta kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Melalui *Asset Based Community Development*, ia menjadi tumpuan untuk penggalian dan penguatan aset-aset yang telah dimiliki komunitas untuk melihat bagaimana memaksimalkan dan memobilisasi secara partisipatif serta berkelanjutan untuk program tersebut. Dengan demikian, program ini memiliki banyak potensi positif sebagai jembatan strategis antara pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat hutan secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini berfokus pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja aset yang dimiliki oleh Desa Setianegara untuk upaya pemberdayaan dalam program pengelolaan ekosistem hutan?
2. Bagaimana program pengelolaan ekosistem hutan di Desa Setianegara untuk pemberdayaan?
3. Bagaimana penerapan konsep *Asset Based Community Development* untuk pemberdayaan pada program pengelolaan ekosistem hutan?
4. Bagaimana hasil program pengelolaan ekosistem hutan untuk pemberdayaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan di atas, maka penelitian ini berfokus pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aset yang dimiliki oleh Desa Setianegara untuk upaya pemberdayaan dalam program pengelolaan ekosistem hutan?
2. Untuk mengetahui program pengelolaan ekosistem hutan di Desa Setianegara untuk proses pemberdayaan.
3. Untuk mengetahui penerapan konsep *Asset Based Community Development* untuk pemberdayaan pada program pengelolaan ekosistem hutan.
4. Untuk mengetahui hasil program pengelolaan ekosistem hutan terhadap pemberdayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian pengembangan masyarakat, pemberdayaan berbasis pemanfaatan lingkungan alam hutan, dan disertai pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai model pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi serta menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan yang mengkaji keterkaitan antara konservasi, pembangunan berkelanjutan, dan peran aktif komunitas lokal dalam mengelola sumber daya alam disertai pada pendekatan berbasis aset lokal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, seperti Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah desa, sektor swasta, serta masyarakat dan komunitas Desa Setianegara sebagai desa penyangga kawasan konservasi. Selain itu, penelitian ini pun diharapkan mampu memberikan gambaran strategi pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya mendukung kelestarian ekologis lingkungan hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara partisipatif, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam upaya konservasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Tinjauan Pustaka

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penulis menggunakan penelitian sebelumnya yang relevan tentang pemberdayaan melalui pemanfaatan ekosistem alam di kawasan konservasi yang melibatkan partisipasi masyarakat serta kekuatan aset lokal, antara lain skripsi dan jurnal. Berikut ini terdapat beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian penulis:

Pertama, Penelitian Aon Situmorang (2022) mengkaji kemitraan konservasi antara masyarakat Desa Rantau Malam dan Taman Nasional. Studi ini bertujuan mengidentifikasi bentuk kemitraan, menganalisis pengembangan ekowisata, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kemitraan formal melalui MoU berhasil membentuk kelompok tani konservasi, meskipun kinerjanya belum maksimal. Program ini didukung oleh komunikasi formal yang baik, namun terhambat oleh keterbatasan sumber daya, birokrasi, dan kapasitas. Di sisi lain, bimbingan teknis terbukti sangat efektif dalam implementasinya. Kesimpulan utamanya adalah keberhasilan sangat bergantung pada kejelasan kesepakatan, dukungan program yang berkelanjutan, dan pendampingan teknis yang efektif.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Markum, dkk (2024) berfokus pada pendampingan dan pemberdayaan Masyarakat Peduli Hutan Kemasyarakatan di Desa Bukit Tinggi, Lombok Barat. Tujuan utamanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

adalah untuk memahami bagaimana masyarakat mengelola hutan secara berkelanjutan, mengatasi deforestasi melalui partisipasi aktif, dan mengidentifikasi potensi strategis seperti hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di lokasi tersebut berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui tiga kegiatan utama: pemanfaatan HHBK, pengembangan ekowisata, serta kegiatan rehabilitasi hutan dan pengendalian hidrologis. Temuan kunci dari penelitian ini adalah bahwa model pengelolaan tersebut terbukti memaksimalkan upaya untuk menyejahterakan masyarakat, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cecep Suhendar (2024) yang berjudul "Analisis Pemanfaatan Hutan Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor." Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan hutan wakaf mampu mendukung pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif dengan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan hutan wakaf di Desa Cibunian berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi, tetapi belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat keterbatasan penerimaan manfaat dan fokus pengelolaan yang masih kepada infrastruktur dan pemeliharaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Landasan Teoretis

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Talcott Parsons merupakan sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Suharto, 2010: 59) dengan prinsipnya: kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan berkelanjutan (Suaib, 2023 18-20). Pemberdayaan bertujuan untuk membina manusia, membina usaha, membina lingkungan, dan membina kelembagaan (Suaib, 2023: 161-164). Adapun tujuan itu untuk mencapai indikator pemberdayaan. Di antaranya menurut Suharto (2010: 65) adalah kesadaran untuk berubah, kemampuan meningkatkan kapasitas, mampu mengatasi hambatan, dan mampu membangun kerjasama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Pengelolaan Ekosistem

Pengelolaan Ekosistem menurut R. Edward Grumbine adalah serangkaian upaya untuk melindungi ekosistem, keanekaragaman hayati, proses & jasa ekologis; serta mengintegrasi prinsip ekologi dengan ekonomi guna memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk stabilitas jangka panjang. Manfaat pengelolaan ekosistem diperoleh dengan mendapatkan jasa ekosistem, yakni berbagai manfaat yang dinikmati manusia dari keberadaan ekosistem

menurut Millennium Ecosystem Assessment (2005: 40) yang meliputi fungsi penyediaan sumber daya, pengaturan lingkungan, nilai budaya dan spiritual, serta dukungan ekologis.

Ekosistem memiliki banyak jenisnya. Salah satunya adalah ekosistem hutan yang merupakan sumber daya alam hayati didominasi pepohonan dalam keterikatan alam dengan lingkungannya (Sanjaya, 2020: 6) dan memiliki fungsi pokok untuk menjaga keseimbangan ekologis (Bakri et al, 2019: 25). Hutan dalam aspek pengelolaannya menggambarkan adanya interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan hutan untuk diperoleh manfaatnya secara ekologi-ekonomi, tetapi tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya (Wiyanto, 2022: 3 & 26).

c. *Asset Based Community Development* (ABCD)

Asset Based Community Development menurut Alison Mathie dan Gord Cunningham adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengeksplorasi serta memaksimalkan aset-aset yang meliputi kekuatan, potensi, kemampuan dan seluruh sumber daya lainnya kemudian memobilisasinya dalam upaya pembangunan berkelanjutan (Afandi et al, 2022: 226). Tujuan pembangunan berbasis aset tersebut adalah pengembangan komunitas agar mandiri dan berkelanjutan. Aset dalam hal tersebut meliputi manusia, sosial, alam, finansial, dan fisik. Penerapan dalam memobilisasi aset dilakukan dengan *appreciative*

inquiry meliputi rangkaian tahapan *Discovery*, *Dream*, *Design*, *Define*, dan *Destiny* untuk menyelidiki, mengidentifikasi, dan mengembangkan lebih lanjut dari sumber daya yang dimiliki (Coghlan et al, 2003: 5).

3. Kerangka Konseptual

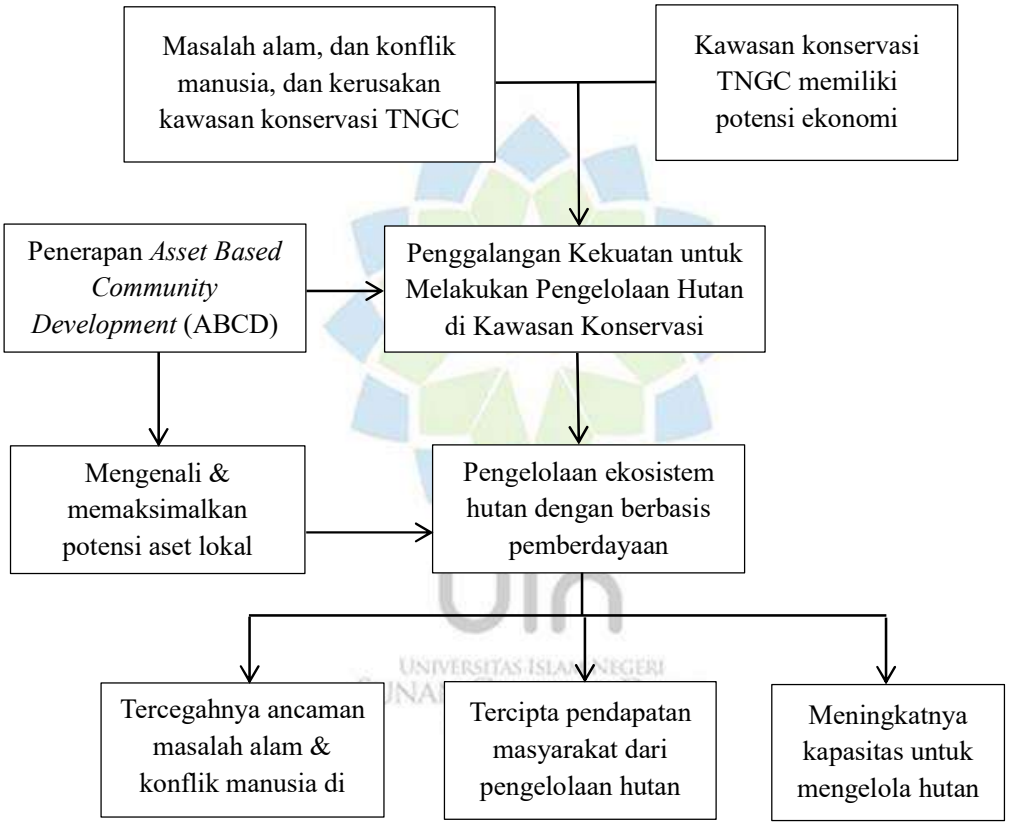

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan konservasi hutan Gunung Ciremai, tepatnya di blok hutan Munjul Masigit, Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan sebagai desa penyangga dari Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

2. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian adalah perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana peneliti melihat realita (*world views*), bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian, dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan (Naamy, 2019: 32). Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menurut Sukmadinata berfokus pada pemahaman bahwa realitas ini bersifat jamak, interaktif, dan terbentuk dari pertukaran pengalaman sosial yang di mana dapat diinterpretasikan oleh tiap individu dan kebenarannya bersifat dinamis (Naamy, 2019: 55). Oleh karena itu, penulis berfokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap perspektif masyarakat yang terlibat dalam program pengelolaan ekosistem hutan yang dilaksanakan di Desa Setianegara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan (Soehartono, 1995: 9). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan dari ucapan ataupun visual dan perilaku yang dapat diamati (Naamy, 2019: 237). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam terhadap upaya pemberdayaan melalui pengelolaan hutan pada kawasan konservasi TNGC di Desa Setianegara serta bagaimana dampaknya secara ekologi-ekonomi pada masyarakat dan lingkungan setempat.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini bersifat kualitatif yang tidak menggunakan data yang terdiri dari angka. Akan tetapi, data dalam kualitatif terdiri dari serangkaian verbal dan non-verbal yang dikumpulkan dari kegiatan penelitian (Rahmadi, 2011: 73). Adapun jenis data yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah

1) Data mengenai aset yang dimiliki oleh Desa Setianegara untuk upaya pemberdayaan dalam program pengelolaan ekosistem hutan di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai.

2) Data mengenai program pengelolaan ekosistem hutan di Desa Setianegara kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai untuk proses pemberdayaan masyarakat.
3) Data mengenai penerapan konsep *Asset Based Community Development* untuk pemberdayaan dalam program pengelolaan ekosistem hutan Desa Setianegara kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai.
4) Data mengenai hasil program pengelolaan ekosistem hutan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Setianegara.

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan jenis data yang diidentifikasi oleh penulis tentang program kegiatan pengelolaan ekosistem hutan di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai Desa Setianegara, maka penulis membutuhkan sumber data yang dianggap relevan, yaitu:

1) Sumber data primer: (a) Kelompok Tani Hutan (KTH) Sapu Jagat dan (b) Pemerintah Desa Setianegara
2) Sumber data sekunder: (a) Dokumentasi pada platform media sosial, artikel, laporan, dan publikasi lainnya yang tersedia mengenai program pengelolaan ekosistem hutan di Gunung Ciremai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

5. Penentuan Informan dan Unit Penelitian

a. Informan dan Unit Analisis

Informan dalam penelitian ini adalah berupa orang atau pelaku yang memberikan informasi penting dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian, sedangkan unit analisis adalah suatu objek, bisa berupa individu, kelompok, benda, situasi sosial, dan lainnya yang diteliti untuk diperoleh informasinya. Hal tersebut membedakan antara subjek dan objek dalam penelitian terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel secara sengaja dan terarah, di mana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian (Rahmadi, 2011: 65) berdasarkan pada jenis data yang ingin diperoleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Ketiga teknik ini dipilih untuk saling melengkapi dan memberikan gambaran yang utuh untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Lebih detail, sebagaimana penjelasannya pada berikut ini:

a. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan kondisi di lapangan terkait pelaksanaan program pengelolaan hutan, partisipasi masyarakat, serta keberadaan aset-aset lokal yang dimanfaatkan. Observasi ini bersifat partisipatif, di mana peneliti hadir sebagai pengamat serta terlibat langsung dalam kegiatan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi, pandangan, pengalaman, dan pemahaman para informan mengenai dinamika program pemberdayaan, pengelolaan hutan, penerapan pendekatan ABCD, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai data sekunder yang relevan, seperti laporan program, dokumen perencanaan, notulensi kegiatan, artikel di media sosial, hingga hasil riset terdahulu yang diterbitkan oleh BTNGC, Pemerintah Desa Setianegara, maupun mitra pelaksana lainnya. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi dan

mengkonfirmasi temuan dari observasi dan wawancara, sekaligus memperkaya konteks dan validitas data penelitian.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi memungkinkan peneliti untuk memeriksa dan memastikan keakuratan data yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui uji kredibilitas beberapa sumber, teknik, dan waktu untuk menegakan kriteria tertentu agar mencapai kriteria keabsahan data (Naamy, 2019: 279-281). Dengan menggunakan triangulasi, hasil penelitian diharapkan lebih valid karena data yang diperoleh dipastikan kembali melalui beberapa pendekatan sehingga dapat mengurangi kemungkinan bias atau kesalahan persepsi.

8. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis data, yakni Teknik analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan urutan data, pengorganisasian ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan interpretasi data. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. (Rahmadi, 2011: 92). Langkah-langkah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

digunakan dengan metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Berbagai data yang berhasil dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen dicatat oleh peneliti dalam catatan lapangannya kemudian ditambahkan ke dalam inventaris data penelitian. Hal tersebut agar mempermudah dalam tahap pengorganisasian data penelitian.

b. Reduksi Data

Data yang sudah berhasil dicatat dari hasil proses pengumpulan data masih bersifat kasar sehingga perlu diseleksi dan diringkas kemudian digolongkan ke pola-pola untuk mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus serta membuang bagian yang tidak penting serta mengaturnya agar ketika disajikan bisa lebih jelas dan tepat sesuai dengan fokus penelitian serta memudahkan ketika pengambilan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Setelah data dikumpulkan dan diorganisir, penyajian data menjadi langkah berikutnya. Tabel, uraian, dan metode penyajian data lainnya digunakan dalam tahapan pada penelitian kualitatif ini. Jadi, data yang sudah melewati dua tahap sebelumnya masih bersifat mentah sehingga

dirangkum dan digabungkan agar penelitiannya bisa disajikan. Hasil dari penyajian data memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjadi tahap terakhir dalam triangulasi. Tahap ini dilakukan untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola, dan alur sebab-akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik dilakukan secara verifikatif dengan cara melihat dan mempertanyakan pemahaman yang lebih tepat: meninjau kembali catatan-catatan lapangan dan menempatkan salinan suatu temuan dalam data serta mengacu dan memanfaatkan teknik keabsahan yang digunakan. Proses yang dilakukan di dalam penarikan kesimpulan adalah salah satu proses yang membutuhkan banyak pertimbangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG